

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Organisasi	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2021

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyediaan jasa pelaksanaan tugas ASN, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan maka dibutuhkan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebagai pembayaran jasa pelaksanaan tugas ASN.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan berencana untuk melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

b. Gambaran Umum

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN merupakan jasa/honorarium dari pelaksanaan tugas ASN pada dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2021.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, untuk jasa/honorarium pelaksanaan tugas ASN pada dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo

- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah:

1. Belanja Bahan Habis Pakai.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan Nomor Kegiatan 2.15.01.2. 02.02 sebesar Rp. 166.720.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah pembayaran jasa dari pelaksanaan tugas ASN pada dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada anggaran 2021 (Januari s.d Desember 2021) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2021;
2. Pelaksanaan Pembayaran Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN pada bulan Januari s.d Desember 2021;
3. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2021;
4. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2021.

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan												
3	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
4	Penyelesaian administrasi kegiatan												

(KAK) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA. 2021

2021

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, September 2021

Disetujui oleh :
Pegguna Anggaran (PA)
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



GUNAWAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002

VERAWATI, S.Sos
NIP. 19760605 200801 2 029

Diketahui Oleh:
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan



GUNAWAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002